

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Partisipasi

2.1.1 Pengertian Partisipasi

Menurut **Tilaar (2009:287)** partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Sumardi (2010:46) mendefinisikan partisipasi sebagai berikut :

“Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.”

Menurut **Arifin (2014)** partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Peran serta tersebut dapat berupa penyampaian saran atau pendapat, memberikan keterampilan-keterampilan tertentu, hingga memberikan barang serta jasa demi tercapainya suatu tujuan dalam pembangunan yang dilakukan bersama-sama.

2.2 Anggaran

2.2.1 Pengertian Anggaran

Menurut **Bastian (2010:191)** anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

Menurut **Mardiasmo (2011:61)** anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Menurut *Governmental Accounting Standar Board (GASB)*, anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

2.2.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran publik yang disusun pemerintah memiliki fungsi yang menghubungkan anggaran dengan pemimpin dan pelaksana yang terkait didalamnya. Menurut **Mardiasmo (2011:63)** anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran Sebagai Alat Politik

Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi Dan Komunikasi

Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja

Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi

Anggaran digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

8. Anggaran Sebagai Alat Menciptakan Ruang Publik

Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintah, anggaran memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
2. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
3. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
4. Anggaran menjadi landasan penilaian kinerja.
5. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

2.2.3 Karakteristik Anggaran Publik

Menurut **Bastian (2010:192)** karakter anggaran meliputi keseragaman, keseluruhan transaksi organisasi, keteraturan penyerahan rancangan per tahun anggarannya, akurasi prakiraan pendapat serta pengeluaran yang didasari oleh persetujuan, dan terpublikasi. Karakteristik anggaran publik terdiri dari :

1. Anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan non-keuangan.
2. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun.
3. Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.2.4 Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik

Menurut **Mardiasmo (2011:67)** Prinsip anggaran harus diterapkan dalam penganggaran publik. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik tersebut meliputi :

1. Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

2. Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *non-budgetair* pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

3. Keutuhan anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).

4. *Nondiscretionary Appropriation*

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

5. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.

6. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadangan yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan in-efisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.

7. Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.

8. Diketahui publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

2.2.5 Siklus Anggaran Publik

Menurut **Mardiasmo (2011:70)** Prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggaraan pemerintah. Siklus anggaran tersebut meliputi empat tahap yang terdiri atas:

1. Tahap Persiapan Anggaran

Pada tahap persiapan, bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai. Kemudian, setiap unit pemerintahan mengajukan anggaran yang selanjutnya akan dikonsolidasikan oleh bagian anggaran. Setelah di-*review* dan menerima pendapat dari semua unit, anggaran ini akan disetujui oleh kepala pemerintahan.

2. Tahap Ratifikasi

Pada tahap ratifikasi, pimpinan eksekutif harus memiliki kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap Implementasi/Pelaksanaan Anggaran

Pada tahap implementasi, anggaran dilaksanakan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Tahap ini merupakan tahap yang penting karena manajer keuangan publik diharuskan memiliki sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tahap pelaporan dan evaluasi merupakan tahap terakhir dalam siklus anggaran. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka tahap pelaporan anggaran dan evaluasi tidak akan menemukan banyak masalah.

2.3 Partisipasi Anggaran

2.3.1 Pengertian Partisipasi Anggaran

Menurut **Mulyadi (2010)** Partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti keikutsertaan *operating managers* dalam memutuskan bersama dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan di masa yang akan ditempuh oleh *operating managers* tersebut dalam pencapaian sasaran anggaran.

Hansen dan Mowen (2009:448) mendefinisikan partisipasi anggaran sebagai berikut :

“Keterlibatan manajer tingkat bawah untuk dikomunikasikan kepada manajer yang membantu mengembangkan anggaran yang memenuhi tujuannya.”

Menurut **Brownell dalam Sardjito dan Muthaher (2008)** Partisipasi anggaran adalah estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi anggaran sebagai keterlibatan

manajer-manajer bertanggungjawab yang berkaitan dengan penyusunan anggaran.

Luh Putu (2014) menjelaskan partisipasi anggaran dapat dibentuk dari komunikasi dan kinerja para unit perusahaan, keikutsertaan para unit dalam penyusunan anggaran akan berpengaruh terhadap tercapainya sasaran anggaran yang diinginkan.

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Partisipasi Anggaran

Menurut **Cherrington** dalam **Tjandra (2008)** terdapat tiga tujuan utama yang dapat dicapai melalui partisipasi dalam penyusunan anggaran, yaitu :

1. Akseptasi karyawan terhadap rencana kegiatan perusahaan.
2. Peningkatan semangat kerja.
3. Peningkatan produktivitas.

Anggaran partisipatif mengarah kepada seberapa besar keterlibatan individu dalam menyusun anggaran serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran. Hal ini diperlukan agar para manajer merasa lebih puas dan produktif dalam bekerja, sehingga akan timbul perasaan untuk selalu ingin berprestasi.

Adapun manfaat dari partisipasi manajer menengah dan bawah dalam menyusun anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Mengurangi ketimpangan informasi dalam organisasi.
2. Menimbulkan komitmen yang lebih besar kepada para manajer untuk melaksanakan dan memenuhi anggaran dan dapat

menciptakan lingkungan yang dapat mendorong perolehan dan penggunaan informasi.

Kesempatan berpartisipasi dalam membuat anggaran dianggap oleh banyak orang dan organisasi sebagai perwujudan kebutuhan aktualisasi diri para anggota organisasi. Banyak juga pihak yang menyakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan suatu alat untuk mempertemukan penghargaan dan kebutuhan pengaktualisasian diri dari anggota-anggota organisasi.

2.3.3 Keunggulan Partisipasi Anggaran

Menurut **Garrison (2006:381)** Keunggulan yang biasa diungkapkan atas partisipasi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang pada semua tingkatan organisasi diakui sebagai anggota tim yang pandangannya dan penilaiannya dihargai oleh manajemen puncak,
2. Orang yang berkaitan langsung dengan suatu aktivitas mempunyai kedudukan terpenting dalam pembuatan estimasi anggaran. Dengan demikian estimasi anggaran yang dibuat oleh orang semacam itu cenderung lebih akurat dan andal,
3. Orang lebih cenderung untuk mencapai anggaran yang penyusunannya melibatkan orang tersebut. Sebaliknya orang kurang terdorong untuk mencapai anggaran yang didrop dari atas,

4. Suatu anggaran partisipatif mempunyai sistem kendalinya sendiri yang unik sehingga jika mereka tidak dapat mencapai anggaran maka yang harus mereka salahkan adalah diri mereka sendiri. Disisi lain jika anggaran didrop dari atas mereka akan selalu berdalih bahwa anggarannya tidak masuk akal atau tidak realistis untuk diterapkan dan dicapai.

2.3.4 Kelemahan Patisipasi Anggaran

Menurut **Hansen dan Mowen (2009:448)** terdapat 3 masalah yang timbul dalam partisipasi penganggaran, yaitu :

1. Penetapan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah
Penetapan target anggaran cenderung akan menjadi tujuan individual manajer dalam situasi penganggaran partisipatif, sehingga penetapan target anggaran yang terlalu mudah ataupun terlalu sulit akan dapat menyebabkan turunnya kinerja manajer. Bila target terlalu mudah untuk dicapai, maka manajer mungkin akan kehilangan semangat dan kinerjanya akan menurun. Sedangkan bila target anggaran terlalu sulit untuk dicapai, kegagalan pencapaian target tersebut akan menyebabkan frustrasi dan mendorong manajer ke arah prestasi kerja yang buruk.
2. Masuknya *slack* (senjangan) anggaran
Anggaran partisipatif menimbulkan kesempatan bagi manajer untuk menciptakan *slack* anggaran. *Slack* anggaran merupakan perbedaan Antara jumlah sumber daya yang sebenarnya

diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang efisien, dengan jumlah yang diajukan oleh manajer yang bersangkutan untuk mengerjakan tugas yang sama. *Slack* anggaran dalam jumlah yang besar dapat merugikan perusahaan, sebab sumber daya yang ada mungkin tidak dapat digunakan secara produktif karena telah terikat di tempat yang sebenarnya tidak membutuhkannya.

3. Partisipasi semu

Hal ini terjadi bila manajer puncak memegang kendali total atas proses penganggaran dan pada saat yang sama juga mencari dukungan partisipasif dari bawahannya. Manajer puncak hanya berusaha untuk mendapatkan penerimaan formal dari bawahannya atas anggaran yang disusun, bukan mencari masukan bagi penyusunan anggaran. Partisipasi semu ini menyebabkan tidak diperolehnya efek-efek positif perilaku manajer yang diharapkan dari adanya penerapan anggaran partisipasif. Dalam hal ini bawahan terpaksa menyatakan persetujuannya terhadap keputusan yang akan ditetapkan karena manajer puncak membutuhkan persetujuan mereka. Permasalahan tersebut harus menjadi perhatian bagi manajemen agar dapat diminimalisir. Penetapan standar yang terlalu tinggi atau rendah dapat diatasi dengan melibatkan para manajer berpartisipasi dalam

menentukan target anggaran yang tinggi tetapi realistis untuk dicapai.

2.3.5 Faktor yang Digunakan Untuk Mengukur Partisipasi Anggaran

Terdapat enam indikator yang dapat digunakan untuk mengukur anggaran partisipatif yang dikemukakan oleh **Milani (1975)** yang diikuti **Tjandra (2008)**, yaitu :

1. Keikutsertaan dalam penyusunan anggaran

Keikutsertaan merupakan keterlibatan para manajer dalam proses penyusunan anggaran. Keterlibatan yang dimaksud dinyatakan dengan hak untuk mengajukan usulan anggaran. Para manajer yang ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan anggaran akan merasa bahwa tujuan anggaran merupakan tujuan bersama yang harus dicapai.

2. Kepuasan yang dirasakan dalam penyusunan anggaran

Kepuasan merupakan kesesuaian hasil yang dirasakan para manajer setelah dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran dan perasaan yang dimiliki manajer terhadap terlaksananya anggaran yang sudah ditetapkan secara partisipatif. Kepuasan yang dirasakan manajer dalam proses penyusunan anggaran, akan memberikan dampak positif terhadap perilaku manajer yang bersangkutan.

3. Kebutuhan memberikan pendapat

Kebutuhan merupakan adanya peranan atau pentingnya partisipasi dari para manajer dalam proses penyusunan anggaran. Manajer akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyusunan anggaran jika mereka merasa bahwa perusahaan membutuhkan pandangan dan pendapat mereka.

4. Kerelaan dalam memberikan pendapat

Kerelaan merupakan kemauan atau inisiatif dari para manajer untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyusunan anggaran. Kerelaan dapat berupa inisiatif para manajer untuk mengajukan usulan anggaran tanpa diminta sebelumnya oleh atasan.

5. Besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran final

Besarnya pengaruh dalam hal ini menunjukkan seberapa besar peran dan kontribusi yang diberikan para manajer terhadap keputusan anggaran final. Pengaruh dalam proses penyusunan anggaran dinyatakan dengan hak para manajer untuk setuju atau menolak anggaran yang ditetapkan.

6. Seringnya atasan meminta pendapat saat anggaran disusun

Seringnya atasan meminta pendapat atau usulan dalam proses penyusunan anggaran mengacu kepada ada tidaknya bagi para manajer untuk mengemukakan pendapat atau mengajukan

usulan anggaran. Hal ini juga menunjukkan ada tidaknya kemauan dari atasan untuk memberikan kesempatan bagi para manajer untuk berpartisipasi secara aktif.

2.4 Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

2.4.1 Pengertian Kinerja

Menurut Permendagri No. 64 tahun 2014, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan menurut **Bastian (2010)** kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan, tujuan misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi

Kinerja (*performance*) dalam **Mahsun, dkk (2011:141)** adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Menurut **Haryanto (2009)** kinerja dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

2.4.2 Pengertian Kinerja Aparatur Pemerintah

Menurut **BPPK Depkeu (2014)** kinerja aparatur pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan aparatur pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi aparatur yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Menurut **Ven (1980)** dalam **Sunarcarya (2008)** kinerja aparatur pemerintah daerah dapat diukur melalui 7 indikator, yaitu :

1. Pencapaian target kinerja kegiatan pada suatu program
2. Ketepatan dan kesesuaian hasil
3. Tingkat pencapaian program
4. Dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat
5. Kesesuaian realisasi anggaran dengan anggaran
6. Pencapaian efisiensi operasional
7. Perilaku pegawai

Menurut **Rohman (2009)** kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode waktu tertentu.

2.4.3 Manfaat Pengukuran Kinerja

Menurut **Mardiasmo (2011:121)** pengukuran kinerja sektor publik ialah :

“Suatu system yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*”.

Menurut **Mardiasmo (2011:122)** manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman.
5. Sebagai alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa keputusan dilakukan secara objektif.

2.4.4 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Mardiasmo (2011:112) menyatakan secara umum tujuan sistem pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.

3. Untuk mengakomodasikan pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goalcongruence*.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Berdasarkan tujuan dan manfaat di atas, pengukuran kinerja sektor publik menurut **Mardiasmo (2011:121)** dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan,
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.4.5 Pelaporan Kinerja

Menurut **Nordiawan (2011:164)** informasi tentang kinerja menjadi informasi penting yang dibutuhkan di setiap fase perjalanan organisasi sektor publik dalam mencapai visi dan misinya. Dalam aspek perencanaan, informasi tentang kinerja memberikan gambaran penting dan fundamental tentang kondisi saat ini yang menjadi basis perencanaan. Informasi tentang kinerja juga dibutuhkan pada saat pelaksanaan kegiatan. Seperti layaknya indikator dan rambu saat berkendara, informasi kinerja berguna bagi organisasi untuk mengetahui posisi dan keberadaannya sehingga dapat mengatur strategi dan terobosan yang diperlukan.

2.5 Kerangka Pemikiran

2.5.1 Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah

Di dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 menjelaskan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi-otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah menyusun program-program dan rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam periode waktu tertentu. Penyusunan program dan rencana kerja ini dilakukan agar kegiatan dan aktivitas pemerintah terstruktur dan terkoordinasi sehingga hasil akhir dapat dikontrol, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada DPR sebagai wakil rakyat. Program dan rencana kerja yang disusun oleh pemerintah akan dikenal dengan istilah anggaran.

Menurut **Wulandari (2013)** agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran yang dinamakan dengan partisipasi anggaran. Menurut **Hansen dan Mowen (2009)** partisipasi anggaran merupakan keterlibatan manajer tingkat bawah untuk dikomunikasikan kepada manajer yang membantu mengembangkan anggaran yang memenuhi tujuannya.

Menurut **BPPK Depkeu (2014)** kinerja aparatur pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan aparatur pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi aparatur yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dalam tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Dengan adanya partisipasi anggaran diharapkan kinerja aparatur pemerintah dapat meningkat **Messa (2013)**.

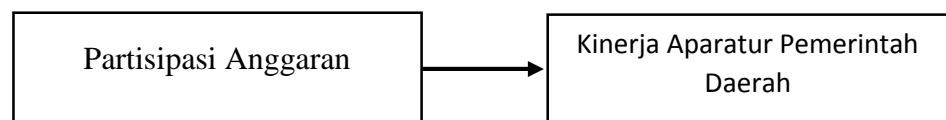
Hasil penelitian yang dilakukan **Pratiwi (2014)** menguji Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating menunjukkan hasil bahwa partisipasi anggran berpengaruh positif pada kinerja di aparat pemerintah daerah. Jika semakin tinggi tingkat partisipasi penyusunan anggaran, maka semakin tinggi tingkat kinerja aparat pemerintah daerah, terutama dengan komitmen organisasi yang jelas. Hasil penelitian yang dilakukan **Wulandari (2013)** menguji Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah menunjukkan partisipasi anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dan komitmen organisasi berpengaruh

positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Sementara menurut penelitian **Anggraeni (2009)** menguji penelitian Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja SKPD Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu menjelaskan bahwa secara parsial maupun simultan tidak terdapat pengaruh antara partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja SKPD pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu.

Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas, terkait dengan pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kota Bandung.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.6 Hipotesis Penelitian

Menurut **Sekaran (2011:135)** hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan yang dapat diuji.

Berdasarkan kerangka pemikiran maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian yaitu partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kota Bandung.

